

Manajemen Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Swasembada Pangan di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan

Institutional Management of Equipment and Agricultural Machinery in An Effort to Improve Food Self-Sufficiency in Banyuasin District of South Sumatera

Hasbi Hasbi^{1*)}, Tri Tunggal¹⁾, Hersyamsi Hersyamsi¹⁾, dan Putri Nurazizah¹⁾

Program Studi Teknik Pertanian Jurusan Teknologi Pertanian

Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya

Koresponden: hasbi@unsri.ac.id

Sitasi: Hasbi H, Tunggal T, Hersyamsi H, Nurazizah P. 2020. Institutional management of equipment and agricultural machinery in an effort to improve food self-sufficiency in Banyuasin district of South Sumatera. In: Herlinda S *et al.* (Eds.), Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-8 Tahun 2020, Palembang 20 Oktober 2020. pp. 438-448. Palembang: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI).

ABSTRACT

This study aimed to determine the growth and worship of UPJA in the study area to achieve its optimal goals by comparing the conditions of the Service Units that were sourced from the Regulations of the Minister of Agriculture. The research was conducted in Banyuasin Regency, South Sumatra Province. This research was carried out in September to October 2019. The parameters that were observed in this study were the availability of the number of equipment, the rental price of machineries, operational performance of the Alsintan Service Business, UPJA system development problems, UPJA system development strategies. The results of this study were the management of UPJA in the tidal and swamp region of Banyuasin Regency, South Sumatra Province, which was quite good based on a comparison of Minister of Agriculture Regulation No. 25 of 2008, UPJA has a role to be a solution in overcoming labor scarcity in rural areas, the existence of UPJA suppresses loss and improves quality rice yields, the development of the UPJA system was intended to support the achievement of agricultural mechanization goals that help farmers achieve increased production, and the presence of UPJA plays an important role in overcoming the needs of agricultural machinery to cultivate land, irrigation, harvesting and post-harvesting.

Keywords: agricultural tools and machinery, swamp area, tidal area

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penumbuhan dan pengembangan UPJA di daerah penelitian dalam mencapai tujuan optimalnya dengan membandingkan kondisi Usaha Pelayanan Jasa yang bersumber dari Peraturan Menteri Pertanian No 25 tahun 2008. Penelitian ini telah dilakukan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan September sampai November 2019. Parameter yang diamati yaitu ketersediaan jumlah alat, harga sewa alsintan, kinerja operasional Usaha Pelayanan Jasa Alsintan, masalah pengembangan sistem UPJA, strategi pengembangan sistem UPJA. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan UPJA di wilayah pasang surut dan sawah lebak Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik berdasarkan perbandingan Peraturan Menteri Pertanian No 25 tahun 2008,

UPJA memiliki peran untuk menjadi solusi dalam mengatasi kelangkaan tenaga kerja di perdesaan, keberadaan UPJA menekan kehilangan dan meningkatkan mutu hasil padi, pengembangan sistem UPJA ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan mekanisasi pertanian yang membantu petani mencapai peningkatan produksi, dan keberadaan UPJA berperan penting dalam mengatasi kebutuhan alsintan untuk mengolah lahan, pengairan, panen dan pasca panen.

Kata kunci: alsintan, sawah lebak, pasang surut

PENDAHULUAN

Kawasan pasang surut dimasa yang akan datang akan menjadi sumber pertumbuhan baru produksi (komoditas) pertanian, karena mempunyai beberapa keunggulan, antara lain: ketersediaan air yang melimpah, topografi relatif datar, akses ke daerah pengembangan dapat melalui jalur darat dan jalur air sehingga memudahkan jalur distribusi, pemilikan lahan yang luas dan ideal bagi pengembangan usaha tani secaca mekanis (Suwanda dan Noor, 2014). Lahan pasang surut maupun lebak sangat berpotensi sebagai lumbung pangan nasional. Optimalisasi pemanfaatan lahan rawa perlu dilakukan untuk mewujudkan rawa sebagai lumbung pangan. Namun, dalam upaya optimalisasi pemanfaatan lahan rawa seringkali dihadapkan pada berbagai masalah antara lain ; kondisi infrastruktur masih minim, biofisik lahan umumnya kurang subur, sosial ekonomi masyarakat, serta dampak lingkungan. (Maftu'ah *et al*, 2016).

Lahan rawa baik pasang surut maupun lebak dapat dimanfaatkan untuk pertanian intensif. Hampir semua tanaman pangan maupun hortikultura dapat tumbuh dengan baik pada lahan rawa pasang surut dan lebak, namun perlu disesuaikan dengan zona tipologi lahan dan tipe luapan airnya agar tumbuh dengan baik. Teknologi penataan lahan dan air dapat meningkatkan optimalisasi pemanfaatan lahan rawa. Beberapa tanaman pangan yang telah tetruji dapat tumbuh dengan baik antara lain ; padi, jagung, kedelai, dan ubi, sedangkan hortikultura jeruk semangka, melon, tomat, cabai dan bawang. Tanaman padi dapat ditanam pada lahan pasang surut tipe A, B,dan, C, lebak dangkal dan tengahan, sedangkan tanaman palawija dan hortikultura dapat ditanam pada lahan C dan D (Maftu'ah *et al*, 2016).

Teknologi yang dapat diaplikasikan di lahan rawa pasang surut di antaranya adalah penataan lahan, pengelolaan tanah dan air, ameliorasi tanah dan pemupukan, varietas adaptif, pengendalian hama/penyakit, alat dan mesin pertanian, dan rekayasa kelembagaan petani (Suryana, 2016). Keberhasilan pemanfaatan dan pengembangan lahan rawa pasang surut dengan teknologi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah dicapai di beberapa daerah seperti di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Jambi. Kawasan lahan rawa di daerah tersebut banyak yang menjadi sentra-sentra produksi tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, tanaman perkebunan, dan ternak (Suryana, 2016).

Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Peran kelembagaan dalam membangun dan mengembangkan sektor pertanian di Indonesia terutama terlihat dalam kegiatan pertanian tanaman pangan, khususnya padi. Di tingkat makro nasional, peran lembaga pembangunan pertanian sangat menonjol dalam program dan proyek intensifikasi dan peningkatan produksi pangan. (Nasrul, 2012).

Dukungan mekanisasi pertanian dapat membantu pembangunan ekonomi Indonesia karena pertanian merupakan sektor penting selain itu juga sumber daya pertanian yang sangat mendukung. Hal itu menyebabkan pertanian menjadi sektor penting dalam

perekonomian serta berperan dalam pembangunan nasional. Adanya hubungan yang erat antara pertanian dan industri serta jasa menjadikan pembangunan pertanian yang dinamis sejalan dengan transformasi perekonomian yang sedang terjadi (Aldillah, 2016).

Hermanto dan Swastika (2011) menyimpulkan bahwa penguatan kelompok tani perlu dilakukan melalui beberapa upaya, seperti membimbing petani untuk bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, mengembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitasi bantuan dan permodalan, peningkatan fasilitasi pembinaan kepada organisasi kelompok, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas usaha tani, meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan dan latihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota (Hanggana, 2018). Dalam penggunaan berbagai jenis alat dan mesin pertanian menjadi peluang ekonomi bagi pemerintah maupun swasta, hal itu dikarenakan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi usahatani secara teknis dan ekonomis serta menciptakan lapangan kerja baru yaitu adanya unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian dan diikuti dengan munculnya usaha penyediaan suku cadang dan perbengkelan perawatan alat dan mesin pertanian (Yeni & Dewi, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penumbuhan dan pengembahan UPJA di daerah penelitian dalam mencapai tujuan optimalnya dengan membandingkan kondisi Unit Pelayanan Jasa yang bersumber dari Peraturan Menteri Pertanian.

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilakukan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, pada bulan September sampai November 2019. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 1) Alat Tulis, 2) Kamera, 3) Laptop. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 1) Kuisisioner, 2) Data, 3) Microsoft Excel 2010.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Pengambilan data primer dilakukan dengan mewawancarai langsung pengurus UPJA di daerah penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui survei instansional untuk mengumpulkan data tentang kelembagaan dan kebijakan penunjang pengembangan alat dan mesin pertanian. Survei instansional ini dilakukan melalui metode pelacakan data sekunder ke instansi terkait di Kabupaten Banyuasin.

Parameter yang diamati dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : ketersediaan jumlah dan jenis alsintan, harga sewa alsintan kinereja operasional upja, masalah pengembangan sistem upja dan strategi pengembangan sistem upja.

Data yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisa dengan metode deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabulasi.

HASIL

1. Perkembangan UPJA "K" di Kecamatan Muara Telang

Perkembangan upja K di kecamatan Muara Telang dapat disajikan pada Tabel 1. dengan membandingkan standar klasifikasi kelembagaan upja oleh Peraturan Kementerian Pertanian No 25 tahun 2008.

Mengacu pada Peraturan Kementerian Pertanian No 25 tahun 2008, klasifikasi upja "K" di Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin tergolong tingkat berkembang. Jumlah alsintan yang dipinjamkan pemerintah tercantum pada Tabel 2.

Alat yang sering disewakan yaitu traktor roda 4 dan *combine harvester*. Biaya sewa penggunaan traktor roda 4 sebesar Rp. 800.000,-/ha dan biaya operator Rp. 150.000,- sedangkan pemakaian *combine harvester* petani membayar dengan sistem bagi hasil panen yaitu 1 : 8, 1 untuk upja dan 8 untuk petani. Penggunaan traktor roda dua petani membayar dengan harga sewa Rp. 115.000,-/ha. Hasil dari harga sewa yang telah ditetapkan terdapat komponen pembagian berupa biaya operator, biaya *helper*, perawatan mesin, dan biaya bahan bakar.

Tabel 1. Perbandingan antara standar klasifikasi kelembagaan UPJA dengan kondisi upja K di Kecamatan Muara Telang

Uraian	Kondisi UPJA K	Matrik Klasifikasi Kelembagaan Upja (Peraturan Kementan No 25 Tahun 2008)		
		Pemula	Berkembang	Profesional
Organisasi				
Legalitas :				
Ad/Art	Ada	Belum Ada	Ada	Ada
Struktur Organisasi				
Manager	Ada	Belum Ada	Ada	Ada
Petugas Administrasi	Ada	Belum Ada	Ada	Ada
Teknisi	Ada	Ada	Ada	Ada
Operator	Ada	Ada	Ada	Ada
Asosiasi UPJA	Anggota Aktif	Belum Jadi Anggota	Anggota Pasif	Anggota Aktif
Pertemuan Rutin UPJA	Sewaktu-Waktu	Belum Ada	Sewaktu-Waktu	Rutin
Teknis				
Jenis Alsintan Yang Dikelola	6 Jenis	1-2 Jenis	3 -4 Jenis	> 5 Jenis
Jumlah Alsintan Yang Dikelola	14 Unit	1-4 Unit	5-9 Unit	> 10 Unit
Gudang Penyimpanan Alsintan	Ada	Belum Ada	Ada	Ada
Kondisi Alsintan	Terawat	Terawat	Terawat	Terawat
Bengkel Alsintan Milik Upja	Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada, Kemitraan
Pelatihan-Pelatihan				
Manager	Sudah	Belum	Sudah	Sudah
Petugas Administrasi	Belum	Belum	Belum	Sudah
Operator	Sudah	Belum	Sudah	Sudah
Ekonomi				
Penambahan Alsintan	Belum	Belum	Sudah	Sudah
Sumber Biaya	Swadaya	Swadaya	Swadaya, Bank	Swadaya, Bank
Penambahan Pelanggan	Ada	Belum Ada	Ada	Ada

Sumber : UPJA K Kecamatan Muara Telang

Tabel 2. Jumlah Alsintan UPJA "K"

Jenis Alat	Jumlah Unit
Traktor Roda 4	4
Traktor Roda 2	5
Pompa Air	2
<i>Combine Harvester</i>	1
<i>Transplanter</i>	1
Eksavator	1

2. Perkembangan UPJA "L" di Kecamatan Air Salek

Perkembangan UPJA "L" di kecamatan Air Salek dapat disajikan pada Tabel 3. dengan membandingkan standar klasifikasi kelembagaan UPJA oleh Peraturan Menteri Pertanian No 25 tahun 2008.

Tabel 3. Perbandingan antara standar klasifikasi kelembagaan UPJA dengan kondisi UPJA L di Kecamatan Air Salek.

Uraian	Kondisi UPJA L	Matrik Klasifikasi Kelembagaan Upja (Peraturan Kementan No 25 Tahun 2008)		
		Pemula	Berkembang	Profesional
Organisasi				
Legalitas :				
Ad/Art	Ada	Belum Ada	Ada	Ada
Struktur Organisasi				
Manager	Ada	Belum Ada	Ada	Ada
Petugas Administrasi	Ada	Belum Ada	Ada	Ada
Teknisi	Ada	Ada	Ada	Ada
Operator	Ada	Ada	Ada	Ada
Asosiasi UPJA	Anggota Aktif	Belum Jadi Anggota	Anggota Pasif	Anggota Aktif
Pertemuan Rutin UPJA	Rutin	Belum Ada	Sewaktu-Waktu	Rutin
Teknis				
Jenis Alsintan yang Dikelola	7 Jenis	1-2 Jenis	3 -4 Jenis	> 5 Jenis
Jumlah Alsintan yang Dikelola	19 Unit	1-4 Unit	5-9 Unit	> 10 Unit
Gudang Penyimpanan Alsintan	Ada	Belum Ada	Ada	Ada
Kondisi Alsintan	Terawat	Terawat	Terawat	Terawat
Bengkel Alsintan Milik Upja	Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada, Kemitraan
Pelatihan-Pelatihan				
Manager	Sudah	Belum	Sudah	Sudah
Petugas Administrasi	Sudah	Belum	Belum	Sudah
Operator	Sudah	Belum	Sudah	Sudah
Ekonomi				
Penambahan Alsintan Sumber Biaya	Sudah	Belum	Sudah	Sudah
Penambahan Alsintan	Swadaya	Swadaya	Swadaya, Bank	Swadaya, Bank
Penambahan Pelanggan	Ada	Belum Ada	Ada	Ada

Sumber : UPJA L Kecamatan Air Salek

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian No 25 tahun 2008, kondisi upja L di Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin sudah tergolong klasifikasi tingkat profesional. Jumlah alsintan yang dipinjamkan pemerintah disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Alsintan UPJA "L"

Jenis Alat	Jumlah Unit
Traktor Roda 4	3
Traktor Roda 2	3
Pompa Air	3
Combine Hervester	5
Transplanter	1
Eksavator	2
Amator	2

Editor: Siti Herlinda et. al.

ISBN: 978-979-587-903-9

Penerbit: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI)

Biaya sewa penggunaan traktor roda 4, dengan harga Rp. 800.000,-/ha dan biaya operator Rp. 100.000,-. Untuk biaya penyewaan mesin panen *combine harvester* dengan sistem bagi hasil panen yaitu 1 : 10. Biaya operator penggunaan mesin *combine hervester* sebesar Rp. 100.000,-. Biaya sewa tersebut berlaku untuk di daerah jangkauan upja "L". Komponen pembagian hasil dari harga tersebut berupa biaya operator Rp. 200.000,-, *helper* Rp. 5000,-/karung dan biaya bahan bakar Rp. 150.000,-. Pengelolaan hasil upja dapat dipersentasekan sebagai berikut 33 % investasi, 33,3 % maintenance, dan 33 % pengrurs upja. Hasil usaha penyewaan alsintan upja "L" telah menambah mesin *combine hervester* sebanyak 2 unit, sehingga dapat meningkatkan proses pemanenan.

3. Perkembangan UPJA "M" di Kecamatan Muara Padang

Perkembangan UPJA "M" di kecamatan Muara Padang dapat disajikan pada Tabel 5. dengan membandingkan standar klasifikasi kelembagaan UPJA.

Tabel 5. Perbandingan antara standar klasifikasi kelembagaan UPJA dengan kondisi UPJA M di Kecamatan Muara Padang, Banyuasin

Uraian	Kondisi UPJA M	Matrik Klasifikasi Kelembagaan Upja (Peraturan Kementan No 25 Tahun 2008)		
		Pemula	Berkem-bang	Profesio-nal
Organisasi				
Legalitas :				
Ad/Art	Belum ada	Belum Ada	Ada	Ada
Struktur Organisasi				
Manager	Ada	Belum Ada	Ada	Ada
Petugas Administrasi	Ada	Belum Ada	Ada	Ada
Teknisi	Ada	Ada	Ada	Ada
Operator	Ada	Ada	Ada	Ada
Asosiasi UPJA	Anggota pasif	Belum Jadi Anggota	Anggota Pasif	Anggota Aktif
Pertemuan Rutin UPJA	Sewaktu-waktu	Belum Ada	Sewaktu-Waktu	Rutin
Teknis				
Jenis Alsintan Yang Dikelola	7 Jenis	1-2 Jenis	3 -4 Jenis	> 5 Jenis
Jumlah Alsintan Yang Dikelola	19 Unit	1-4 Unit	5-9 Unit	> 10 Unit
Gudang Penyimpanan Alsintan	Ada	Belum Ada	Ada	Ada
Kondisi Alsintan	Terawat	Terawat	Terawat	Terawat
Bengkel Alsintan Milik Upja	Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada, Kemitraan
Pelatihan-Pelatihan				
Manager	Sudah	Belum	Sudah	Sudah
Petugas Administrasi	Belum	Belum	Belum	Sudah
Operator	Sudah	Belum	Sudah	Sudah
Ekonomi				
Penambahan Alsintan Sumber Biaya	Belum	Belum	Sudah	Sudah
Penambahan Alsintan	Swadaya	Swadaya	Swadaya, Bank	Swadaya, Bank
Penambahan Pelanggan	Ada	Belum Ada	Ada	Ada

Sumber : UPJA M Kecamatan Muara Padang

Mengacu pada Peraturan Kementerian Pertanian No 25 tahun 2008, klasifikasi upja "M" di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin tergolong tingkat berkembang. Jumlah alsintan yang dipinjamkan pemerintah tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Alsintan UPJA "M"

Jenis Alat	Jumlah Unit
Traktor Roda 4	2
Traktor Roda 2	7
Pompa Air	4
Combine Harvester	2
Handsprayer	1
Eksavator	2
Power thresher	1

4. Perkembangan UPJA "N" di Kecamatan Rambutan

Perkembangan UPJA "N" di Kecamatan Muara Padang dapat disajikan pada Tabel 7. dengan membandingkan standar klasifikasi kelembagaan UPJA.

Tabel 7. Perbandingan antara standar klasifikasi kelembagaan UPJA dengan kondisi UPJA N, di Kecamatan Rambutan, Banyuasin

Uraian	Kondisi UPJA N	Matrik Klasifikasi Kelembagaan Upja (Peraturan Kementan No 25 Tahun 2008)		
		Pemula	Berkembang	Profesional
Organisasi				
Legalitas :				
Ad/Art	Ada	Belum Ada	Ada	Ada
Struktur Organisasi				
Manager	Ada	Ada	Ada	Ada
Petugas Administrasi	Ada	Belum Ada	Ada	Ada
Teknisi	Ada	Belum Ada	Ada	Ada
Operator	Ada	Ada	Ada	Ada
Asosiasi UPJA	Anggota Pasif	Belum Jadi Anggota	Anggota Pasif	Anggota Aktif
Pertemuan Rutin UPJA	Sewaktu-Waktu	Belum Ada	Sewaktu-Waktu	Rutin
Teknis				
Jenis Alsintan Yang Dikelola	3-4 jenis	1-2 Jenis	3 -4 Jenis	> 5 Jenis
Jumlah Alsintan Yang Dikelola	5-9 Unit	1-4 Unit	5-9 Unit	> 10 Unit
Gudang Penyimpanan Alsintan	Ada	Belum Ada	Ada	Ada
Kondisi Alsintan	Terawat	Terawat	Terawat	Terawat
Bengkel Alsintan	Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada, Kemitraan
Milik Upja				
Pelatihan-Pelatihan				
Manager	Sudah	Belum	Sudah	Sudah
Petugas Administrasi	Belum	Belum	Belum	Sudah
Operator	Sudah	Belum	Sudah	Sudah
Ekonomi				
Penambahan Alsintan	Sudah, <i>combine harvester</i>	Belum	Sudah	Sudah
Sumber Biaya	Penerimaan sewa alat	Swadaya	Swadaya, Bank	Swadaya, Bank
Penambahan Alsintan				
Penambahan Pelanggan	Ada	Belum Ada	Ada	Ada

Mengacu pada Peraturan Kementerian Pertanian No 25 tahun 2008 yang disajikan Tabel 7. **maka UPJA N** yang berada di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin

Editor: Siti Herlinda et. al.

ISBN: 978-979-587-903-9

Penerbit: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI)

tergolong klasifikasi tingkat berkembang. Jumlah alsintan yang dipinjamkan pemerintah disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Jumlah Alsintan UPJA “N”

Jenis Alat	Jumlah Unit
Traktor Roda 4	3
Combine Harvester	2

Upja N berdiri sejak tahun 2007. Biaya sewa pemakaian *combine harvester* untuk satu hektarnya sejumlah Rp. 1.200.000,-, penyiapan lahan menggunakan traktor roda 4 adalah Rp. 600.000,-.

Hasil usaha penyewaan alsintan UPJA “N” telah menambah mesin *combine harvester* sebanyak satu unit, sehingga dapat meningkatkan proses pemanenan dan pendapatan upja N.

5. Perekembangan UPJA “O” di Kecamatan Rambutan

Tabel 9. Perbandingan antara standar klasifikasi kelembagaan UPJA dengan kondisi UPJA O di Kecamatan Rambutan Banyuasin

Uraian	Kondisi UPJA O	Matrik Klasifikasi Kelembagaan Upja (Peraturan Kementan No 25 Tahun 2008)		
		Pemula	Berkembang	Profesional
Organisasi				
Legalitas : Ad/Art	Ada	Belum Ada	Ada	Ada
Struktur Organisasi				
Manager	Ada	Ada	Ada	Ada
Petugas Administrasi	Ada	Belum Ada	Ada	Ada
Teknisi	Ada	Belum Ada	Ada	Ada
Operator	Ada	Ada	Ada	Ada
Asosiasi UPJA	Anggota Aktif	Belum Jadi Anggota	Anggota Pasif	Anggota Aktif
Pertemuan Rutin UPJA	Sewaktu-Waktu	Belum Ada	Sewaktu-Waktu	Rutin
Teknis				
Jenis Alsintan Yang Dikelola	3-4 jenis	1-2 Jenis	3 -4 Jenis	> 5 Jenis
Jumlah Alsintan Yang Dikelola	5-9 Unit	1-4 Unit	5-9 Unit	> 10 Unit
Gudang Penyimpanan Alsintan	Ada	Belum Ada	Ada	Ada
Kondisi Alsintan	Terawat	Terawat	Terawat	Terawat
Bengkel Alsintan Milik Upja	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada, Kemitraan
Pelatihan-Pelatihan				
Manager	Sudah	Belum	Sudah	Sudah
Petugas Administrasi	Belum	Belum	Belum	Sudah
Operator	Sudah	Belum	Sudah	Sudah
Ekonomi				
Penambahan Alsintan	Belum	Belum	Sudah	Sudah
Sumber Biaya	Swadaya	Swadaya	Swadaya, Bank	Swadaya, Bank
Penambahan Alsintan	Swadaya	Swadaya	Swadaya, Bank	Swadaya, Bank
Penambahan Pelanggan	Ada	Belum Ada	Ada	Ada

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian No 25 tahun 2008, kondisi upja O di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin tergolong klasifikasi tingkat berkembang. Jumlah alsintan yang dipinjamkan pemerintah disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Jumlah Alsintan UPJA “Putra Parung”

Jenis Alat	Jumlah Unit
Traktor Roda 4	1
Traktor Roda 2	6
Combine Harvester	1

Upja O berdiri sejak tahun 2016. Biaya sewa pemakaian *combine harvester* untuk satu hektarnya sejumlah Rp. 1.200.000,-, penyiapan lahan menggunakan traktor roda 4 adalah Rp. 600.000,-. Hasil usaha sewa alsintan digunakan untuk biaya operasional dan honor pengurus upja.

PEMBAHASAN

Usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian adalah lembaga yang mengelola bantuan alat dan mesin pertanian yang dipinjamkan oleh pemerintah melalui sistem pengajuan proposal permohonan pinjam pakai alsintan. Kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan alsintan yang telah dipinjamkan harus membuat surat perpanjangan pinjaman alsintan setiap 4 bulan sekali.

Alsintan yang ada di upja tidak hanya dipinjamkan atau disewakan kepada anggota kelompok petani yang tergabung dalam upja tersebut, tetapi dapat disewakan juga di luar wilayah jangkauan dengan tujuan alat yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif.

Untuk meningkatkan kemampuannya, maka pengurus lima kelembagaan yang disurvei ini sudah pernah mengikuti pelatihan mengenai perawatan alat, penanaman, dan pasca panen. Sedangkan untuk operasional alat, dari perusahaan alat-alat berat juga sudah memberikan bimbingan kepada operator. Keahlian operator yang sudah terlatih akan lebih cepat menyelesaikan pekerjaan. Oleh karena itu, operator harus mendapatkan pelatihan yang memadai termasuk mengenai perawatan dan perbaikan alsintan.

Ketersediaan alsintan sangat diperlukan pada kegiatan usahatani bagi petani, karena semua kegiatan usahatani mulai dari saat pengolahan tanah, tanam, pemeliharaan, pengairan, panen, hingga pasca panen memerlukan alsintan sesuai dengan tingkat kegiatannya. Dibandingkan dengan yang dibutuhkan, kemampuan pemerintah dalam penyediaan alsintan hingga saat ini relatif masih terbatas. Oleh karena itu, pemilihan pengadaan alsintan harus didasarkan pada prioritas kebutuhan petani (Sugiarto, 2010).

Kelembagaan UPJA belum diarahkan untuk menghasilkan produk berdaya saing tinggi, belum didukung oleh jaringan permodalan, peningkatan kemampuan manajerial, serta sarana dan infrastruktur perdesaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut beberapa alternatif kebijakan dapat dilakukan, yaitu : (1) Kelembagaan UPJA perlu diintegrasikan dengan pengembangan kelembagaan perekonomian desa lainnya; (2) Jasa pelayanan alsin harus difokuskan pada pengembangan produk pertanian dalam arti luas; dan (3) Kelembagaan UPJA harus diintegrasikan dengan percepatan dan penguatan agroindustrialisasi di perdesaan (Henny dan Pranadji, 2012)

Menurut Tarigan (2018), pengembangan upja merupakan upaya dalam membangun upja yang belum berkembang ke arah mandiri dan profesional yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan usaha, dikelola berdasarkan skala ekonomi, berorientasi pasar dan didukung oleh sumberdaya manusia profesional. Dengan kata lain, pengembangan upja difokuskan pada pengelolaan upja yang berorientasi bisnis. Untuk menjadi upja yang

berorientasi bisnis, maka upja dimotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dengan memperhatikan aspek organisasi, teknis dan ekonomis.

Penguatan upja dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan upja sehingga jangkauan pelayanan upja semakin luas. Penguatan upja akan difokuskan pada upja pemula dan upja Berkembang.

Menurut Henny dan Pranadji (2012), untuk mengatasi permasalahan tersebut beberapa alternatif kebijakan dapat dilakukan, yaitu : (1) Kelembagaan upja perlu diintegrasikan dengan pengembangan kelembagaan perekonomian desa lainnya; (2) Jasa pelayanan alsin harus difokuskan pada pengembangan produk pertanian dalam arti luas; dan (3) Kelembagaan upja harus diintegrasikan dengan percepatan dan penguatan agroindustrialisasi di perdesaan. Peningkatan pemahaman profesi berkaitan dengan peningkatan kemampuannya tentang sistem UPJA secara komprehensif perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sebagian besar (80 %) upja yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin tergolong klasifikasi Berkembang dan 20 % klasifikasi Profesional. Pengelolaan upja di wilayah pasang surut dan sawah lebak Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan masih perlu ditingkatkan lagi untuk dapat mencapai tujuan optimalnya. Keberadaan upja berperan dalam mengatasi kebutuhan alsintan untuk mengolah lahan dan proses panen.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini YN, dan Nadida Z. 2015. Analisis Kelembagaan Petani dalam Mendukung Keberfungsian Infrastruktur Irigasi (Studi Kasus : Daerah Irigasi Batang Anai, Sumatera Barat). *Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum*. 6 (3):140 - 221.
- Aldillah R. 2016. Kinerja Pemanfaatan Mekanisasi Pertanian dan Implikasinya Dalam Upaya Percepatan Produksi Pangan di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 34 (2): 163 - 171.
- Alwi M. 2014. Prospek Lahan Rawa Pasang Surut untuk Tanaman Padi. *Prosiding Seminar “Inovasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi”*. Banjarbaru, 46 - 59.
- Anantanyu S. 2011. Kelembagaan Petani : Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. *Jurnal Sepa*, 7 (2):102 - 109.
- Arsyad DM. 2015. Pengembangan Inovasi Pertanian di Lahan Rawa Pasang Surut Mendukung Kedaulatan Pangan. *Pengembangan Inovasi Pertanian*, 7 (4): 169 - 176.
- Djamhari S. 2013. Kajian Penerapan Mekanisasi Pertanian di Lahan Rawa Lebak Desa Putak-Muara Enim. *Jurnal sains dan teknologi Indonesia*, 11 (3): 157 - 161.
- Hanggana S. 2018. Analisis Kelemahan Regulasi Poktan, Gapoktan, UPJA, dan LKM-A dalam Peningkatan Pendapatan Petani. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 15 (2):137 - 149.
- Henny MH dan T Pranadji. 2012. Pola Pengembangan Kelembagaan Upja untuk Menunjang Sistem Usahatani Padi Yang Berdayasaing. *Analisis Kebijakan Pertanian*. 10 (4), 347-360
- Hutapea Y, Thamrin T, dan Marpaung IS. 2016. Peran dan Kinerja Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian “Bakti Karya Petani” di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Telang. *Balai Pengkajian Tekologi Pertanian Sumatera Selatan*, 1262 - 1268.
- Maftu’ah E, Annisa W, dan Noor M. 2016. Teknologi Pengelolaan Lahan Rawa untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Konteks Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 10(2): 103 - 114.

- Mayrowani H, dan Pranadji T. 2016. Pola Pengembangan Kelembagaan UPJA untuk Menunjang Sistem Usaha Tani Padi yang Berdayasaing. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10 (4): 347 - 360.
- Nasrul W. 2012. Pengembangan Kelembagaan Pertanian Untuk Peningkatan Kapasitas Petani Terhadap Pembangunan Petani. *Menara Ilmu*, 3(29), 166 - 174.
- Priyanto A. 1997. Penerapan Mekanisasi Pertanian. *Jurnal Keteknikan Pertanian*, 11(1): 54 - 58.
- Raharjo B, Sutrisno, Hutapea Y, Subowo, dan Rijallalah. 2005. *Pengembangan Kelembagaan Unit Pelayanan Jasa Alsintan Melalui Introduksi Alat Pengereng Gabah di Lahan Rawa Pasang Surut*. Laporan Akhir. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan.
- Rahmawati E. 2012. Kajian Investasi Petani Lahan Pasang Surut di Kabupaten Banjar. *Jurnal Agribisnis Perdesaan*, 2 (4): 333 - 351.
- Sippa. 2015. *Profil Banyuasin*. [Online] Available at: http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_15_03114869BAB_2_Profil_Banyuasin.pdf [Accessed 22 September 2019].
- Suryana. 2016. Potensi dan Peluang Pengembangan Usaha Tani Terpadu berbasis kawasan di lahan rawa. *Jurnal Litbang Pertanian*, 35(2):57 - 68.
- Sugiarto. 2010. Analisis Kinerja UPJA Menunjang Kegiatan Usaha Tani Padi. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 10 (2): 118 – 130.
- Suwanda MH, dan Noor M. 2014. Kebijakan Pemanfaatan Lahan Rawa Pasang Surut untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 31 - 40.
- Suyatno A, Imelda dan Komariyati. 2018. Pengaruh Penggunaan Traktor Terhadap Pendapatan dan Penggunaan Tenaga Kerja pada Usahatani Padi di Kabupaten Sambas. *Journal Of Agribusiness and Rural Development Research*, 4(2): 93 - 100.
- Tarigan H. 2018. Mekanisasi Pertanian dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA). *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 36 (2), Desember 2018: 117-128 DOI: <http://dx.doi.org/10.21082/fae.v36n2.2018.117-128> 1
- Yeni F, dan Dewi N. 2017. Analisis Sistem Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Dinamika Pertanian*, 29 (2):169 - 182.